

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang yang terdiri dari seluruh benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam tersebut secara sendiri, keberlangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. Pada lingkungan hidup terdapat ekosistem yaitu susunan kompleks unsur-unsur lingkungan hidup yang berinteraksi dan membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan utuh. Otto Soemarwoto (1983) lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang mencakup dan terdapat pada setiap organisme hidup atau dunia dan berdampak bagi kehidupan sehari- hari (Effendi et al., 2018).

Salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting adalah danau. Danau merupakan ekosistem air tawar yang menempati luas permukaan terkecil dibandingkan ekosistem lainnya (Hasim, 2017). Danau di Indonesia memiliki peran yang penting dalam mendukung keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar danau tersebut. Beberapa fungsi ekosistem danau antara lain sebagai bank yang menyimpan potensi keanekaragaman hayati, sebagai reservoir alami bagi limpasan air hujan dan sungai, sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan berbagai kegiatan, sebagai penyedia komoditas hayati secara

ekonomi bagi bidang perikanan, sebagai alat transportasi, dan sebagai tujuan wisata karena memiliki nilai estetika yang tinggi dari danau tersebut.

Danau Sipin merupakan salah satu danau yang terletak di Provinsi Jambi tepatnya di kecamatan telanaipura, kelurahan legok. Danau Sipin merupakan perairan tawar yang terbentuk secara alami, bentuknya mirip seperti tapal kuda (*oxbow lake*). Luas sekitar ± 227 Ha dan volume $\pm 8.347.000$ m³, kedalamannya normal berkisar 3.50-5.00 meter yang membentang sepanjang desa dengan dasar bentuk seperti cekungan. Sumber air yang mengalir ke danau sipin berasal dari Sungai Buluran I, Sungai Buluran II, dan Sungai Putri dan bermuara ke Desa Pulau Pandan sebelum mengalir ke Sungai Batanghari (Saragih & Erizka, 2018).

Kegunaan Danau Sipin berfokus tidak hanya pada industri budidaya ikan, melainkan berfungsi sebagai tempat penyimpanan air untuk mengantisipasi banjir bagi masyarakat kota, berfungsi juga sebagai tempat rekreasi umum bagi penduduk kota jambi, dan berfungsi sebagai jalur lomba pacu perahu dan ketek hias yang termasuk agenda rutin Pemerintah Kota Jambi untuk mempromosikan kawasan Danau Sipin (D. Jambi, 2022).

Tabel 1. 1 Kualitas Air Danau Sipin Tahun 2016-2024 (Parameter pH)

No	Nama Danau	Tahun	Rata-rata (pH)
1	Danau Sipin	2016	6.36
		2017	7.42
		2018	7.21
		2019	7.57
		2020	7.10
		2021	5.00
		2022	6.14
		2023	7.41
		2024	6.81

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Danau Sipin sekitar 3-5 meter dari tepi danau tersebut bermunculan sampah-sampah dan eceng gondok yang diakibatkan oleh peningkatan aktivitas di danau sipin dan aliran yang berasal dari sungai-sungai yang mengalir kearah danau sipin membawa sampah. Permasalahan lainnya disebabkan oleh kesuburan (eutrofikasi) air danau akibat erosi dan sedimentasi lahan. Nilai pH air danau yang stabil terdapat pada angka 6.0-9.0.

Berdasarkan data yang disajikan, Danau Sipin tidak mengalami peningkatan pH sejak tahun 2016-2024. Permasalahan lingkungan tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas yang dilakukan di Danau Sipin serta faktor alam yang sesuai dengan kondisi geografis dan alam. Pencemaran air juga membawa dampak negatif bagi beberapa aspek kehidupan masyarakat. Bagi nelayan yang bekerja sebagai pembudidaya ikan keramba jaring apung mengalami kesulitan dalam proses pencarian ikan dan penebaran jaring, akibatnya terhambat laju kecepatan perahu yang disebabkan adanya penumpukan sampah dan eceng gondok. Dampak bagi pemilik usaha wisata rekreasi berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung sebagai penikmat keindahan Danau Sipin yang mempengaruhi terhadap pendapatan (Ahmad, 2022). Dampak bagi kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran air menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal dan peningkatan perkembangbiakan jentik nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 9 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, memantau kualitas air pada sumber air, dan

memantau faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan kualitas air dalam rangka pengendalian pencemaran air. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi memiliki peran dalam pengendalian pencemaran air.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan pencemaran dan kerusakan khususnya dalam menjaga kualitas mutu air Danau Sipin. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan “World Cleanup Day” sebuah kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membersihkan, menjaga, dan memelihara lingkungan baik dari diri sendiri, rumah, maupun lingkungan masyarakat. World Cleanup Day yang dilaksanakan di Danau Sipin bertujuan untuk mengintensifkan pembersihan dan pemilahan sampah guna mencapai ekonomi sirkular mandiri. Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi beberapa sektor seperti Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Jambi, dan masyarakat sekitar danau sipin (Budhi Santoso, 2022).

Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya pembersihan sampah dan eceng gondok yang mencapai sekitar 35-40 ton per hari, namun upaya ini tidak sebanding dengan petugas yang terlibat dalam pembersihan tersebut. Mengakibatkan proses pembersihan tertunda dan tidak efektif. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menyiapkan alat mekanis khusus untuk membantu yaitu kapal pembersih dengan masing-masing tiga petugas yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan secara rutin di kawasan danau sipin (Ahmad, 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait pencemaran air. Penelitian pertama dilakukan oleh Amira Arni dan Susilawati (2022) dengan judul penelitiannya “Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Sampah di Desa Bagan Kuala Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai” pada penelitian ini masyarakat di Desa Bagan Kuala Tanjung Beringin kurang menunjukkan kurangnya kepedulian dalam menjaga kebersihan lingkungannya, dan mereka terus-menerus melakukan upaya untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar. Sebagian besar penduduk di wilayah Bagan Kuala tidak memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) dalam mengelola sampah. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menerapkan praktik pengelolaan sampah yang etis.tidak berhasil dalam membantu mencegah pencemaran air (Arni, 2022).

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Futiha Nazar, Sutarto Mochtar, Ely Sufianti, Endang Wirjatmitrilestari, Edah Jubaedah (2020) dengan judul penelitiannya “Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Domestik ke Badan Air Penerima di Kabupaten Purwakarta” hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan filter dalam ruangan di Kabupaten Purwakarta belum berjalan sesuai rencana karena belum adanya peraturan mengenai penggantian filter. Air limbah domestik dibuang ke drainase atau selokan dan sungai karena banyak pemahaman mengenai etika dan praktik penanganan kontaminasi limbah domestik, serta melemahkan pemahaman masyarakat umum mengenai dampak kontaminasi limbah domestik terhadap kualitas air (Nazar et al., 2021).

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Mutia Alviena Sari (2022) dengan judul penelitiannya “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai” hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota patroli gagal bekerjasama ketika melakukan pencemaran lingkungan secara kelompok yang beranggotakan 24 orang. Keberhasilan dari kebijakan ini mengalami sedikit kemajuan yang dicapai karena rendahnya pemahaman masyarakat umum, khususnya pekerja industri terhadap undang – undang yang baru dibuat (Mutia Alviena Sari, 2023).

Persamaan ketiga penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti secara umum membahas topik pencemaran air. Perbedaan Lokus penelitian ini berada di Danau Sipin Kota Jambi, sementara penelitian terdahulu berlokasi di tempat yang berbeda seperti Desa Bagan Kuala Tanjung Beringin, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Dumai. Dari segi fokus, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis implementasi kebijakan peraturan daerah kota jambi tentang pengendalian pencemaran air, perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang lebih membahas pencemaran akibat sampah, limbah domestik, dan kebijakan pengelolaan lingkungan secara umum. Selain itu, penelitian ini meneliti secara mendalam mengenai tahapan implementasi kebijakan., dan efektivitas strategi pengendalian pencemaran air. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menyoroti aspek kepedulian masyarakat, praktik pengelolaan limbah, serta kendala administratif dalam kebijakan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam analisis kebijakan lingkungan di Kota Jambi, khususnya dalam konteks implementasi peraturan daerah terkait pengendalian pencemaran air di Danau Sipin.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan judul penelitian “ **Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Kasus : Danau Sipin**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Danau Sipin?
2. Bagaimana penyempurnaan pengendalian pencemaran air di Danau Sipin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Danau Sipin
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyempurnaan pengendalian pencemaran air di Danau Sipin

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan pada bidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam

pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengendalian Pencemaran Air.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Jambi

Penelitian ini dapat memberikan saran bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai evaluasi untuk meningkatkan bagaimana proses pengendalian pencemaran air terutama di Danau Sipin.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori diartikan sebagai pernyataan yang disusun secara sistematis dan variabel yang kuat. Sebuah penelitian, landasan teori sangat penting secara eksplisit terhadap sebuah teori yang akan dilakukan penelitian kritis dan evaluasi. Menurut Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumaryati teori adalah seperangkat asumsi, teori, konstruk, dan saran yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial secara sistematis dengan mengkaji hubungan antar teori (Sumaryati, 2018). Penggunaan teori akan mempermudah bagi peneliti untuk memahami suatu gejala sosial. Oleh karena itu, peneliti menjabarkan landasan teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

1.5.1 Kebijakan Publik

Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah (Dye, 2017). Carl Friedrich mendefinisikan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich, 1963). Eyestone mendefinisikan kebijakan publik adalah hubungan yang berkelanjutan antara suatu unit atau lembaga pemerintah dengan lingkungannya (Eyestone, 1971). Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 9 berbunyi “Pemerintah memiliki wewenang dalam upaya pengendalian pencemaran air dengan (1) menetapkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran (2) melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar (3) menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah (4) menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air (5) memantau kualitas air pada sumber air (6) dan memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air” (P. K. Jambi, 2016).

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Pressman dan Widavsky mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses penerapan atau eksekusi. Proses implementasi yang mandiri sebagai bahasa kerja yang dapat dipahami dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya dikaitkan dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan yang terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara dimana suatu kebijakan mencapai tujuannya.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan adalah sebagai peraturan dan ketentuan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tindakan seperti ini dapat membantu dalam mentransformasikan suatu keputusan-keputusan menjadi suatu tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu atau juga dapat membantu memastikan pelaksanaan tepat waktu atas setiap perkembangan signifikan yang dihasilkan dari keputusan-keputusan tersebut (Pramono, 2020). Pengukuran Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Indikator keberhasilan dan tujuan kebijakan harus dinyatakan dengan jelas agar pihak pelaksana tidak menginterpretasikan secara berbeda yang dimaksud oleh pembuat kebijakan. Beragamnya interpretasi dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya meliputi uang, material, manusia dan berbagai insentif yang dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan. Insentif sebagai sarana untuk memperoleh kebijaksanaan bagi yang berhasil melaksanakan tugas.

c. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas-Aktivitas Penguatan

Komunikasi antar organisasi yang efektif atau tidak efektif dalam organisasi yang melaksanakan kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan. Penguatan terhadap pihak pelaksana diperlukan untuk menjamin keberhasilan penerapan kebijakan.

d. Karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan

Keterampilan dan jumlah tenaga kerja dalam suatu organisasi, menunjukkan komunikasi yang efektif, dan menunjukkan hubungan formal dan informal antara organisasi dan proses pembuatan atau penerapan kebijakan.

e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Ketersediaan ekonomi sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial merupakan komponen mendasar dari setiap kebijakan publik. Dengan mempertimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat baik dalam formulasi kebijakan maupun implementasi kebijakan.

f. Disposisi pelaksana kebijakan

Pemahaman tentang kebijakan, reaksi terhadap penolakan penerimaan dan netralitas, serta kekuatan respon (Kasmad, 2017)

Grindle mendefinisikan implementasi sebagai proses politik dan administratif. Proses politik meliputi perumusan usulan kebijakan yang melibatkan

berbagai pelaku kebijakan. Proses administratif melibatkan prosedur umum terkait dengan tindakan administratif yang dapat diamati pada tingkat program tertentu.

Pengukuran Implementasi Kebijakan menurut Grindle :

a. Kebijakan

Pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat umum dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Organisasi

Organisasi yang menjadi pelaksana memiliki kewenangan dan sumber daya yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan bagi masyarakat.

c. Lingkungan

Lingkungan kebijakan bergantung pada positif dan negatif. Lingkungan positif akan memberikan dukungan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan negatif akan memberikan hambatan yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan (Akib, 2010).

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengendalian Pencemaran Air di Danau Sipin dapat ditinjau sejauh mana kondisi di Danau Sipin secara langsung apakah sudah sesuai dengan kondisi yang seharusnya dengan ketentuan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengendalian Pencemaran Air yang berpengaruh terhadap beberapa kegiatan yang dilakukan di Danau Sipin.

George C Edward III mendefinisikan implementasi kebijakan adalah fase pembuatan kebijakan yang terletak antara penetapan kebijakan dan dampak

kebijakan terhadap masyarakat yang terdampak. Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C Edward III karena teori ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi terkait faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi proses implementasi. Pengukuran Implementasi Kebijakan yaitu sebagai berikut (Fauzan, 2024):

a. Komunikasi

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air di Kota Jambi dapat berjalan secara efektif apabila implementor memahami apa yang perlu dilakukan, tujuan apa yang perlu dicapai, dan bagaimana mengkomunikasikan tujuan kebijakan untuk meminimalisir hambatan saat implementasi. Indikator dimensi Komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi. Transmisi adalah bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat. Kejelasan adalah bagaimana informasi terkait kebijakan tersebut harus jelas. Konsistensi adalah keseragaman informasi terkait kebijakan dari waktu ke waktu dan berbagai sumber.

Indikator transmisi digunakan untuk melihat bagaimana cara penyampaian kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat. Indikator kejelasan digunakan untuk melihat bagaimana proses penyampaian terkait kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air secara rinci dan jelas agar pelaksanaan berjalan secara efektif dan efisien. Indikator konsistensi digunakan untuk melihat bagaimana

kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air disampaikan secara berkala dengan koordinasi rutin antar instansi.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor kritis dalam implementasi kebijakan. Sumber daya dapat menunjukkan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Indikator dimensi sumberdaya yaitu Sumber daya manusia, Sumber daya anggaran, Sumber daya peralatan, Sumber daya kewenangan. Sumber daya manusia merupakan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumber daya anggaran merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan dimulai dari gedung, teknologi, hingga peralatan pendukung lainnya. Sumber daya kewenangan adalah memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan yang efektif untuk melaksanakan tugas.

Indikator sumber daya manusia digunakan untuk melihat bagaimana ketersediaan staff atau personil yang cukup dan kompeten untuk melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air tersebut. Indikator Sumber Daya Anggaran digunakan untuk melihat bagaimana alokasi dana yang memadai dan pengelolaan penggunaan anggaran secara efektif untuk melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air. Indikator Sumber Daya Peralatan digunakan untuk melihat bagaimana ketersediaan peralatan yang memadai untuk mendukung Kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air. Indikator Sumber Daya Kewenangan digunakan untuk melihat bagaimana implementor kebijakan

melaksanakan tugas mereka mencakup untuk membuat keputusan, memberikan perintah dan mengalokasikan sumber daya.

c. Disposisi

Disposisi merupakan pengetahuan, keinginan dan kemauan para implementor untuk melaksanakan kebijakan guna menjamin tercapainya suatu tujuan. Indikator dimensi disposisi yaitu Pengangkatan Birokrat dan Intensif. Pengangkatan Birokrat merupakan pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi terhadap Kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air. Intensif merupakan salah satu upaya untuk mempengaruhi kecenderungan para implementor kebijakan.

Indikator dimensi Pengangkatan Birokrat digunakan untuk melihat bagaimana staff/pelaksana menguasai terkait tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air. Indikator dimensi intensif digunakan untuk melihat bagaimana memanipulasi disposisi para implementor kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah yang melaksanakan kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap implelementasi kebijakan. Indikator dimensi struktur birokrasi yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan Fragmentasi. Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman internal terkait kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi. Standard Operating Procedure dapat memaksimalkan waktu yang tersedia dan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja staff dalam birokrasi, dan

meningkatkan fleksibilitas dan kerja tim mematuhi aturan pada pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air. Fragmentasi merupakan pendistribusian tanggung jawab kebijakan kepada beberapa pihak secara koordinasi.

1.5.3 Pengendalian

Pengendalian adalah proses mengukur dan membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian sebagai suatu proses berarti bahwa pengendalian merupakan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain dan mengubah *input* menjadi *output*. Dengan menggunakan berbagai instrumen yang tersusun secara sistematis seperti panduan, norma, dan instruksi teknis. Robbins dan DeCenzo dalam buku Eko Sugiyanto mendefinisikan pengendalian merupakan proses mengamati setiap kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan mengambil tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan yang signifikan. Setiap pemimpin mempunyai hak tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengendalian, sekalipun unit yang dipimpinya telah menyelesaikan tugas sesuai dengan rencana (Sugiyanto, 2016).

Subagya dalam buku Eko Sugiyanto menjelaskan bahwa pengendalian adalah mengoptimalkan cara pelaksanaan suatu program, proyek, atau kegiatan oleh unsur dan unit pelaksana. Dapat dilakukan melalui tata laksana, yang merupakan seperangkat aturan dan prosedur, dan melalui tindakan turun tangan. Puspoprano dalam buku Eko Sugiyanto menjelaskan pengendalian berperan penting dalam menyempurnakan siklus manajemen menjadi suatu kesatuan yang utuh. Pengendalian bertindak sebagai sistem yang mengarahkan dan

mengintegrasikan berbagai fungsi manajerial seperti pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, dan pemberian arahan agar selaras dengan target serta tujuan yang ditetapkan dalam tahap perencanaan (Sugiyanto, 2016).

Menurut Griffin, pengendalian merupakan proses pengaturan seluruh aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen kinerja yang menjadi sasaran dapat tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran Pengendalian yaitu sebagai berikut:

a. Menetapkan Standar

Standar merupakan seperangkat kriteria dan ukuran yang menjadi acuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Standar juga sebagai persyaratan dasar mengenai tingkat kinerja yang wajib dipenuhi. Penetapan standar dapat dilakukan secara mandiri oleh sebuah institusi atau badan tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu menetapkan standar operasional untuk pengendalian pencemaran air. Standar dapat meliputi parameter penilaian pencemaran air, pemantauan kualitas air, serta penetapan standar sumber daya di Danau Sipin. Penetapan Standar menjadi acuan untuk menuntukan pengendalian berjalan sesuai dengan tujuan.

b. Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses evaluasi yang membandingkan antara hasil kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (*“Das Sollen & Das Sein”*). Penentuan standar menjadi komponen yang fundamental dalam sistem pengukuran kinerja. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat mengukur kualitas air dalam kategori

tingkat pencemaran, mengukur kualitas sumber daya yang digunakan. Pengukuran kinerja menjadi penilaian untuk mengetahui efektivitas pengendalian pencemaran air.

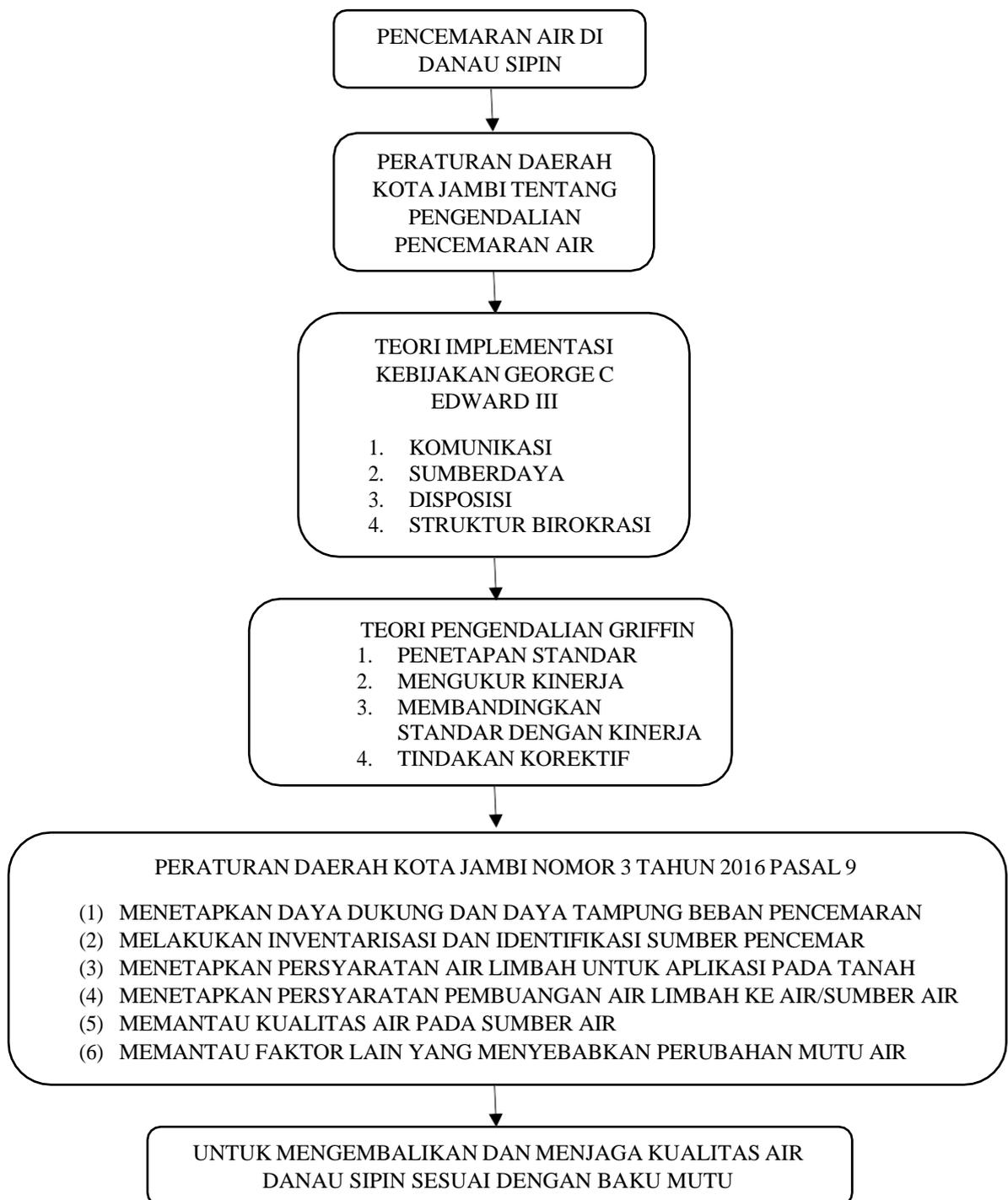
c. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Pencapaian target kinerja memerlukan adanya kerja sama yang baik antara pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Penetapan standar yang disepakati bersama dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan antara hasil kinerja yang telah dicapai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu membandingkan hasil kualitas air berdasarkan baku mutu sesuai peraturan yang berlaku. Perbandingan menunjukkan apakah pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif atau memerlukan perbaikan.

d. Menentukan Kebutuhan / Tindakan Korektif

Tindakan korektif merupakan serangkaian proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian antara hasil kinerja yang telah dicapai dengan standar yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, perbaikan dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu dengan melakukan penyesuaian standar, mengubah metode pengukuran atau memodifikasi prosedur pelaksanaan pekerjaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan.

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut metodologi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen metode penelitian kualitatif adalah suatu proses yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati, tujuan penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman secara umum mengenai pendapat atau sebuah opini sosial para partisipan. Sedangkan menurut David Williams (1995) penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan (Feny Rita Fiantika et al, 2022).

Jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan fenomena yang dikumpulkan dari berbagai sumber data dalam bentuk naratif.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian yaitu Danau Sipin Kota Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai dinas yang memiliki wewenang atas pengendalian pencemaran air.

1.7.3 Fokus Penelitian

Agar peneliti bisa lebih memahami yang dilakukan dan dapat mencapai tujuan penelitian yang telah disusun, maka penelitian ini akan berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

1.7.4 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan dua (2) sumber data yaitu:

a. Data Primer

Husein Umar (2013:42) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik perorangan maupun organisasi (Syafnidawaty, 2020). Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek, melainkan melalui sumber lain yang telah tersedia sebelumnya seperti website, dokumen, dan buku. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang memuat PERDA Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, serta dokumen pendukung lainnya.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan metode teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling menurut Arikunto sampel bertujuan dilakukan dengan mengambil subjek berdasarkan adanya suatu tujuan tertentu

(Lenaini, 2021). Berdasarkan teknik ini yang dapat menjadi informan yaitu orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti. Berikut informan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu :

- A. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, bidang ini termasuk kedalam struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan teknis pengendalian, pemantauan, dan pengawasan
- B. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kota Jambi, lembaga ini memiliki fokus pada isu-isu lingkungan termasuk pengendalian pencemaran air. Walhi secara aktif mengawasi dan mengadvokasi isu pencemaran air.
- C. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki peran penting dalam menilai dan mengawasi dampak lingkungan dari berbagai aktivitas.
- D. Masyarakat Kota Jambi, masyarakat memiliki peran yang dapat memberikan perspektif mengenai dampak dari kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran air

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

A. Observasi

Morris (1973: 906) mendefinisikan observasi sebagai suatu kegiatan yang melibatkan melihat suatu fenomena menggunakan instrumen dan membandingkannya dengan tujuan ilmiah atau pendidikan lainnya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa observasi merupakan kumpulan pengetahuan tentang dunia

sekitar berdasarkan seluruh pengetahuan umat manusia. Menurut Adler & Adler (1987: 389) menyatakan bahwa observasi adalah salah satu prinsip inti dari semua metode pengumpulan data kualitatif, khususnya ketika menyangkut pencerahan konsep-konsep sosial dan psikologis umat manusia (Hasanah, 2016).

Observasi merupakan aktifitas yang dijalankan secara langsung dilakukan pengamatan di lokasi penelitian tersebut. Pada penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di Danau Sipin Kota Jambi untuk mengamati kondisi danau sipin tersebut. Tipe observasi yang dilakukan peneliti adalah Observasi Partisipatif semacam ini mengharuskan peneliti terlibat dalam aktivitas sehari-hari individu yang diamati atau digunakan sebagai sumber data. Observasi pasif terjadi ketika peneliti mengunjungi area aktivitas orang yang diamati namun tidak berpartisipasi di dalamnya.

B. Wawancara

Zurayah (2009), wawancara adalah suatu alat untuk mengumpulkan informasi dengan menghasilkan sejumlah besar pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara jelas dan ringkas (Feny Rita Fiantika et al, 2022). Wawancara adalah proses berkomunikasi atau berinteraksi dengan subjek penelitian guna mengumpulkan informasi melalui saling bertanya. Model wawancara yang akan dilakukan yaitu Wawancara Semi Terstruktur, wawancara jenis ini disebut wawancara mendalam dan pelaksanaannya lebih menyeluruh dibandingkan wawancara jenis pertama yang bersifat semi

terstruktur. Wawancara ini dapat mencari masalah secara terbuka berdasarkan responden yang diwawancara tersebut ditanya mengenai pendapat.

C. Dokumentasi

Menurut (Zuriah,2009) Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui laporan tertulis seperti arsip, serta buku-buku tentang teori, praktik, hukum, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah penelitian (Feny Rita Fiantika et all, 2022).Dokumen yang biasa digunakan bisa berupa teks, gambar, atau tulisan penting seseorang. Penggunaan metode observasi dan kualitatif dianggap sebagai komponen kunci dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Patton (2002), analisis data merupakan proses mengatur, mengklasifikasikan, menyusun, mengidentifikasi pola, serta memperoleh makna dari data yang diperoleh dalam penelitian. Patton menegaskan bahwa fleksibilitas dalam analisis data sangat penting guna memahami secara mendalam kompleksitas realitas sosial yang sedang diteliti (Patton Q, 2002). Bogdan dan Taylor (1975) analisis data merupakan proses mengatur dan menyusun data, mengelompokkannya ke dalam bagian-bagian yang lebih terstruktur, menyusun kembali, mengidentifikasi pola, menentukan aspek yang signifikan untuk dipelajari, serta merumuskan kesimpulan yang dapat disampaikan kepada pihak lain (Bogdan, 1975).

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Model analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah

model analisis data kualitatif interaktif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Matthew B.Miles, 1994).Teknik analisis model interaktif ini terdiri dari :

A. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dalam memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini dilakukan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, serta mengeliminasi data yang tidak relevan, sehingga data yang dihasilkan lebih terstruktur dan bermakna dalam mendukung proses analisis lebih lanjut.

B. Penyajian Data

Miles and Huberman (1994) penyajian data merupakan proses mengatur dan menyusun informasi secara sistematis agar memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif, matriks, grafik, tabel, atau diagram, dengan tujuan mempermudah pemahaman terhadap data yang telah direduksi (Matthew B.Miles, 1994).

C. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses menafsirkan makna dari sekumpulan data yang disajikan dengan cara yang lebih dari sekadar melihat apa yang tertulis, melainkan memahami atau menafsirkan apa yang dimaksud dalam data. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dituangkan dalam catatan lapangan, yang dibagi menjadi dua bagian deskriptif dan reflektif.

Catatan deskriptif didasarkan pada pengamatan dan pengalaman peneliti, tanpa gagasan atau interpretasi pribadi terhadap fenomena tersebut. Catatan reflektif merupakan catatan yang berisi pengamatan, komentar, pendapat, dan penafsiran peneliti terhadap temuan yang ditemukan, serta informasi untuk rencana pengumpulan data di masa mendatang.

D. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (1994) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, serta temuan yang memiliki makna. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui peninjauan ulang data, perbandingan dengan temuan sebelumnya, serta memastikan keakuratan dan validitas kesimpulan agar dapat dipertanggungjawabkan.

1.7.8 Triangulasi Data

Triangulasi merupakan penggunaan dua sumber atau lebih untuk memperoleh informasi menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mengintegrasikan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang ada. Teknik triangulasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memperoleh informasi yang sama. Peneliti menggunakan observasi pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber mengacu pada pengumpulan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang sama.